



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx  
xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,  
RT.015 RW.007, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,  
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;  
Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan  
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxx,  
RT.021 RW.007, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx;  
Termohon;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 27 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 598/19/X/2013 tertanggal 10 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Halaman 1 dari 1 halaman Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PURWAKARTA dan telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ahmad Miftahul Dzikri bin Dadan (Purwakarta, 16 Oktober 2016 / umur 7 tahun), NIK 3214061810160003, pendidikan SD, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Juli 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon kurang taat dan suka membantah nasihat dari Pemohon, dan sering mengakibatkan percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
  - b. Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan selalu menuntut nafkah lebih di luar kemampuan Pemohon;
  - c. Termohon memiliki sifat tempramental dan mudah tersulut emosinya dan sering mengeluarkan kata-kata kasar ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2017, yang akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kampung Babakan Jati, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahlilai rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan

Halaman 2 dari 2 halaman Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratatan yang berkepanjangan;

7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 400.12.2./028/V/2024 tertanggal 17 Mei 2024, yang diterbitkan oleh Kantor xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (Dadan bin Omon) untuk berikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Dede Siti Juliawati Binti Sulaeman) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 07 Juni 2024 dan Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Pwk dan tanggal 13 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214041606940006 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Dadan yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 598/19/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Darangdan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Kampung Bababkan Jati RT.015 RW.007 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, adalah Ibu Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2013;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.021 RW.007, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ahmad Miftahul Dzikri bin Dadan (Purwakarta, 16 Oktober 2016 / umur 7 tahun), NIK 3214061810160003, pendidikan SD, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2016 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang taat dan suka membantah nasihat dari Pemohon, dan sering mengakibatkan percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan selalu menuntut nafkah lebih di luar kemampuan Pemohon dan Termohon memiliki sifat tempramental dan mudah tersulut emosinya dan sering

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kata-kata kasar ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Termohon;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2017, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersatu lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Kampung Bababkan Jati RT.015 RW.007 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, adalah Ayah Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2013;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.021 RW.007, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ahmad Miftahul Dzikri bin Dadan (Purwakarta, 16 Oktober 2016 / umur 7 tahun), NIK 3214061810160003, pendidikan SD, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2016 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang taat dan suka membantah nasihat dari Pemohon, dan sering mengakibatkan percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan selalu menuntut nafkah lebih di luar kemampuan Pemohon dan Termohon memiliki sifat tempramental dan mudah tersulut emosinya dan sering mengeluarkan kata-kata kasar ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2017, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersatu lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 07 Juni 2024 dan Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Pwk dan tanggal 13 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon kurang taat dan suka membantah nasihat dari Pemohon, dan sering mengakibatkan perkecokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan selalu menuntut nafkah lebih di luar kemampuan Pemohon dan Termohon memiliki sifat tempramental dan mudah tersulut emosinya dan sering mengeluarkan kata-kata kasar ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1, SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sehingga perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon kerap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga membuat Pemohon berpisah tempat tinggal/ranjang selama enam tahun;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ahmad Miftahul Dzikri bin Dadan (Purwakarta, 16 Oktober 2016 / umur 7 tahun), NIK 3214061810160003, pendidikan SD, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon kurang taat dan suka membantah nasihat dari Pemohon, dan sering mengakibatkan percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan selalu menuntut nafkah lebih di luar kemampuan Pemohon dan Termohon memiliki sifat temperamental dan mudah tersulut emosinya dan sering mengeluarkan kata-kata kasar ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017;

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasehat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sejak pernikahan tanggal 10 Oktober 2013, antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan dan dalam perkawinan tersebut dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ahmad Miftahul Dzikri bin Dadan (Purwakarta, 16 Oktober 2016 / umur 7 tahun), NIK 3214061810160003, pendidikan SD, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;

Bahwa sejak bulan Juli 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang taat dan suka membantah nasihat dari Pemohon, dan sering mengakibatkan percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan selalu menuntut nafkah lebih di luar kemampuan Pemohon dan Termohon memiliki sifat tempramental dan mudah tersulut emosinya dan sering mengeluarkan kata-kata kasar ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal/ranjang sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberikan nasehat dan mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi bersatu dalam rumah tangga maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon tanggal Nomor : 65/LPBP/2024/PA.Pwk, tanggal 27 Mei 2024., Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Purwakarta tanggal Nomor : 65/LPBP/2024/PA.Pwk, tanggal 27 Mei 2024. tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Purwakarta tahun Anggaran 2024

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 778/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 25 Juni 2024 yang inti dari amarnya adalah mengizinkan Pemohon untuk beracara secara cuma-cuma, maka Pemohon dapat dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
4. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Purwakarta Tahun Anggaran 2024;

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Tibyani, S.Ag., M.H. dan Deni

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriansyah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Rachmad Irwanto Frans Suli, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Lia Yuliasih, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tibyani, S.Ag., M.H.

Deni Heriansyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Rachmad Irwanto Frans Suli, SH.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)